

KAJIAN KONSEP ARSITEKTUR KONTEKSTUAL PADA BANGUNAN PEMERINTAHAN

STUDY OF CONTEXTUAL ARCHITECTURE CONCEPTS IN GOVERNMENT BUILDINGS

Mohamad Baskoro¹, Dedi Hantono²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta
¹2018460031@ftumj.ac.id

Abstrak: Arsitektur Kontekstual merupakan suatu konsep dalam menciptakan desain bangunan beserta aspeknya dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Perancangan pada arsitektur kontekstual dapat menjadikan rancangan bangunan atau kawasan yang berkesinambungan dengan lingkungan sekitarnya, dengan desain baru yang karakteristiknya menyelaraskan lingkungan sekitar. Namun arsitektur kontekstual juga bisa bertentangan dengan komponen – komponen pada lingkungan sekitarnya. Penerapan konsep arsitektur kontekstual pada penelitian ini mengambil studi preseden pada bangunan Gedung Mahkamah Konstitusi. Dari studi preseden tersebut akan dianalisis pembahasan melalui tujuh prinsip arsitektur kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konteks berpengaruh pada desain arsitektur Kantor Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta. Diharapkan hasilnya dapat menjadi referensi bagi perencanaan dan perancangan bangunan pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada bangunan pemerintah yang kemungkinan menggunakan konsep arsitektur kontekstual. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan mengidentifikasi tiap poin dari prinsip arsitektur kontekstual.

Kata kunci: *Kontekstual, Mahkamah Konstitusi, Prinsip Kontekstual.*

Abstract: *Contextual architecture is a concept in creating building designs and their aspects by taking into account the surrounding environment. The design of contextual architecture can make the design of buildings or areas sustainable with the surrounding environment, with new designs whose characteristics harmonize with the surrounding environment. However, contextual architecture can also conflict with components in the surrounding environment. The application of the concept of contextual architecture in this study takes precedent studies on the Constitutional Court Building. From the precedent study, the discussion will be analyzed through the seven principles of contextual architecture. This study aims to determine how context influences the architectural design of the DKI Jakarta Constitutional Court Office. It is hoped that the results can be a reference for planning and designing government buildings. This research was conducted in a government building that is likely to use the concept of contextual architecture. The research method used is descriptive qualitative by describing and identifying each point of the principles of contextual architecture.*

Keywords: *Contextual, Constitutional Court, Contextual Principles.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai konstitusi atau Undang-undang Dasar. Konstitusi berfungsi sebagai norma untuk sistem politik, dan undang-undang negara biasanya diformalkan secara tertulis. Konstitusi, dalam rangka pembentukan negara, menyediakan peraturan dan prinsip-prinsip badan politik dan hukum. Frasa ini secara khusus merujuk pada pembentukan konstitusi nasional sebagai aturan dasar politik dan hukum, serta pembentukan struktur, prosedur, dan otoritas pemerintahan negara secara umum.

Legislasi hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika badan selain legislatif diberi tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu produk hukum itu konstitusional dan menolak untuk memberlakukannya jika badan ini memutuskan bahwa itu tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi membutuhkan sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya, seperti kantor perwakilan. Tempat yang menjadi simbol filosofis, fungsional, dan teknis serta menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern dan dapat diandalkan, merupakan persyaratan khusus bagi kantor atau gedung Mahkamah Konstitusi.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat juga semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta jumlah penduduk yang terus meningkat. Kantor perwakilan pemerintah merupakan salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan.

Konsekuensinya, pembangunan gedung pemerintahan memerlukan penerapan konsep arsitektur yang menekankan pada kenyataan bahwa suatu bangunan perlu memiliki hubungan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk menekankan atau menyelaraskan fungsi-fungsinya. Bangunan pemerintahan dapat menghasilkan desain yang memadukan desain modern dan tradisional dengan menerapkan konsep arsitektur kontekstual pada elemen-elemennya. Gedung pemerintahan juga dapat berbaaur dengan lingkungan tempat mereka berada.

Aktivitas, lingkungan, dan visual adalah tiga komponen utama dari konsep kontekstual (Wiwik Setyaningsih, Indira Aldilla, 2018). Suatu rancangan arsitektur yang dikenal dengan arsitektur kontekstual mengkaji keselarasan antara bangunan dari berbagai gaya dan era arsitektur pada lokasi yang berdekatan serta memperhatikan masalah visual antar bangunan dan nuansa lingkungannya (Hantono et al., 2021). Dalam desain arsitektural, ide dan metode tertentu digunakan untuk membuat desain yang disesuaikan dengan persyaratan tertentu dan memiliki karakteristik berbeda yang membedakan desain antara arsitek, antar lokasi, atau antara gaya arsitektur tertentu. Prinsip-prinsip yang dirumuskan menentukan bagaimana strategi rancangan diimplementasikan. Rumusan khusus pendekatan kontekstual sangat tergantung pada kondisi lokal, tetapi dapat didasarkan pada prinsip-prinsip umum. Mirip dengan bagaimana teori-teori tertentu didasarkan pada paradigma tertentu, prinsip-prinsip umum yang ditemukan juga bersifat pribadi.

Ada beberapa kriteria mendasar yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghubungkan bangunan baru dengan lingkungannya guna menerapkan arsitektur kontekstual pada Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Dalam bukunya tahun 1985 *Lingkungan Responsif*, Ian Bentley menerapkan kriteria ini melalui teori dan mendaftar tujuh kriteria mendasar: 1) Aksesibilitas dan distribusi yang dapat bernapas, (2) Variasi; variasi kegunaan, keterbacaan, dan (4) Kekokohan; kemudahan identifikasi bangunan dan orientasi rongga temporal, (5) Kekayaan; (6)

Kesesuaian Visual, (6) Kekayaan Material fisik yang mudah dikenali berdasarkan fungsinya, (7) Personalisasi; melibatkan partisipasi dari pihak masyarakat dan masyarakat.

Dalam Kwanda (2004), Brolin (1980) menyatakan bahwa konsep desain dalam konteks terbagi menjadi kontras dan harmoni. Hubungan kesinambungan bangunan baru dan lama akan didasarkan pada kedua aspek tersebut. Perbedaan yang secara signifikan berbeda dari lingkungan sekitarnya disebut kontras atau berbeda. Sebaliknya, arti kebalikan dari kontras adalah "harmoni", yang memberikan landasan di mana bangunan baru akan menyerap dan menerapkan unsur-unsur tipologi, filosofi, dan material bangunan lama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konteks berpengaruh pada kantor Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan mengenai konsep arsitektur kontekstual bagi para praktisi maupun akademisi. Selain itu menjadi referensi bagi perencanaan dan perancangan bangunan pemerintah yang mempertimbangkan kehadiran lingkungan sekitar dalam proses perancangannya, bangunan yang memiliki nilai estetis dengan menghadirkan konteks ke dalam arsitektur.

2. METODE PENELITIAN

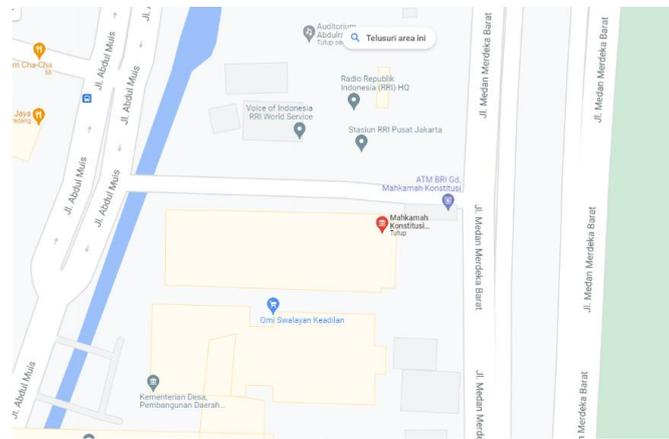
Penelitian ini merupakan kajian mengenai desain pada bangunan kantor Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan konsep arsitektur kontekstual. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Melalui penelitian yang lebih mendalam ke literatur, data dan informasi dikumpulkan. Penulis akan menganalisis Gedung Mahkamah Konstitusi ditinjau dari teori-teori berupa konsep arsitektur kontekstual dan prinsip-prinsip arsitektur kontekstual, kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut dengan menggunakan teori-teori yang dikembangkan Ian Bentley dalam bukunya *Responsive Environment* tahun 1985 dan Brolin (1980).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gedung Mahkamah Konstitusi berada di Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Gambir, Jakarta Pusat. Gedung MK berada di kawasan gedung pemerintahan, terdapat beberapa bangunan pemerintahan seperti Gedung Balaikota DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, BUMN, dan gedung pemerintahan lainnya.

Gedung MK yang berdiri di atas lahan seluas 4.220 m² dan terbagi menjadi dua bagian ini memiliki tinggi 75,3 meter, menurut CRP (2007). Podium neo-klasik yang berfungsi ganda sebagai ruang sidang adalah bagian pertama. Bagian kedua terdiri

dari menara perkantoran dengan 16 lantai. Bangunan ini memiliki total luas lantai 23.000 m².



Gambar 1 : Lokasi Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Prayogo (2019) mengatakan bahwa sembilan pilar di depan gedung tidak hanya memberikan kesan yang mengesankan, tetapi juga menjadi simbol bagi sembilan Hakim Konstitusi. Tim Penasehat Arsitektur Kota DKI dikabarkan keberatan karena rumusan arsitektur tidak menentukan jumlah tiang yang ganjil. Namun, Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu tetap setia pada desain sembilan pilar tersebut.

Meski berstatus sebagai "rumah konstitusi", desain gedung MK juga menyampaikan rasa kehangatan masyarakat. Salah satunya dibangun dengan desain yang tidak berpagar dan memiliki taman kecil di depan Gedung MK yang tertata rapi. MK ingin menghilangkan kesan angkuh pada bangunannya dengan halaman terbuka ini. Dinas Pertamanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui tata letak gedung yang apik ini sebagai "Bangunan Ramah Lingkungan".

Dasar Kontekstual dari gedung Mahkamah Konstitusi ini akan dijabarkan secara keseluruhan melalui Teori Kontekstual menurut Brolin-Bentley yaitu prinsip-prinsip kontekstual, sebagai berikut.

A. *Permeability*

Akses masuk ke dalam tapak berada bagian timur tapak dan akses keluar dari tapak berada pada bagian barat tapak, sirkulasi kendaraan yang masuk dan keluar dari tapak memiliki garis lurus yang saling terhubung. Untuk masuk ke dalam tapak akses kendaraan ditujukan dari Jl. Medan Merdeka Barat dimana jalan tersebut merupakan jalan utama, lalu untuk keluar tapak di arahkan ke Jl. Abdul Muis dimana jalan tersebut berada bagian barat (belakang bangunan).



Gambar 2 : Akses Pintu Masuk ke Tapak. Sumber: Google maps, 2022



Gambar 3 : Akses Pintu Keluar dari Tapak. Sumber: Google maps, 2022

Untuk akses sirkulasi manusia terdapat pedestrian di depan tapak yang disediakan oleh pemerintah, pedestrian ini berada disepanjang jalan Medan Merdeka Barat dan pedestrian ini memiliki ukuran yang cukup lebar $\pm 4m$, berbeda dengan pedestrian pada bagian akses keluar tapak yang berukuran yang tidak sama dari pedestrian yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat.

Untuk lebar Jalan Medan Merdeka Barat yang berada di depan tapak memiliki ukuran $\pm 6m$, memiliki tiga lajur kendaraan, satu lajur busway dan bahu jalan. Kondisi jalan seperti ini memudahkan pengunjung atau pengguna untuk melihat atau masuk ke dalam tapak.



Gambar 4 : Lebar Jalan Medan Merdeka Barat. Sumber: Google maps, 2022

Sedangkan untuk akses transportasi umum pengunjung atau pengguna bisa naik kendaraan umum seperti bus kota dan busway. Di kawasan tapak terdapat halte bus dan halte busway yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tapak bangunan gedung MK untuk para pejalan kaki.

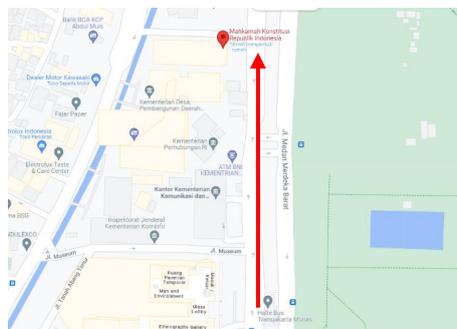


Gambar 5 : Halte Bus Kota. Sumber: Google maps, 2022



Gambar 6 : Halte Transjakarta. Sumber: Google maps, 2022

Pengunjung atau pengguna yang ingin datang ke gedung MK khususnya bagi pengguna jalan kaki turun dari halte busway menuju ke gedung MK berjarak $\pm 280\text{m}$, pejalan kaki akan merasa aman karena disetiap jalan medan merdeka barat terdapat pedestrian atau jalur pejalan kaki.



Gambar 7 : Jarak Halte Transjakarta ke Mahlamah Konstitusi.
Sumber: Google maps, 2022

B. Variety

Bentley mengatakan bahwa variasi berarti sebuah bangunan atau area memiliki banyak fungsi dan bentuk yang berbeda. Menurut prinsip Kontekstual Bentley, keragaman fungsi dibagi menjadi prinsip kontras (Dantrivani, 2021), sehingga menara dan podium memiliki tujuan yang berbeda di bagian kedua gedung Mahkamah Konstitusi. Bentuk bangunan ini dipengaruhi oleh berbagai fungsi yang dilayaninya. Penggunaan pertama adalah untuk kantor di bagian menara. Gedung podium digunakan sebagai ruang pertemuan. Ini memiliki dua ruang pertemuan untuk panel dan ruang pertemuan pleno yang besar.



Gambar 8 : Menara dan Podium Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Sumber : Mahkamah Konstitusi RI



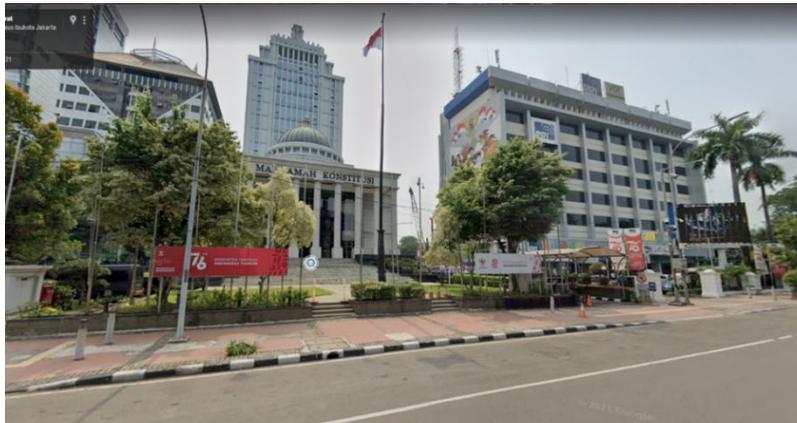
Gambar 9 : Ruang Sidang Pleno. Sumber : Mahkamah Konstitusi RI



Gambar 10 : Ruang Sidang Panel. Sumber : Mahkamah Konstitusi RI

C. Legibility

Penerapan prinsip *legibility* pada bangunan gedung Mahkamah Konstitusi menerapkan sesuai konteks dengan bangunan sekitarnya dan memiliki unsur kontras pada bangunan sekitarnya. Orientasi bangunan juga sangat jelas dilihat langsung oleh masyarakat sekitar. Orientasi bangunan menghadap ke arah timur yang berhadapan dengan jalan utama Jl. Medan Merdeka Barat, sehingga kemudahan orientasi bangunan cukup mudah untuk dilihat dari jalan utama.



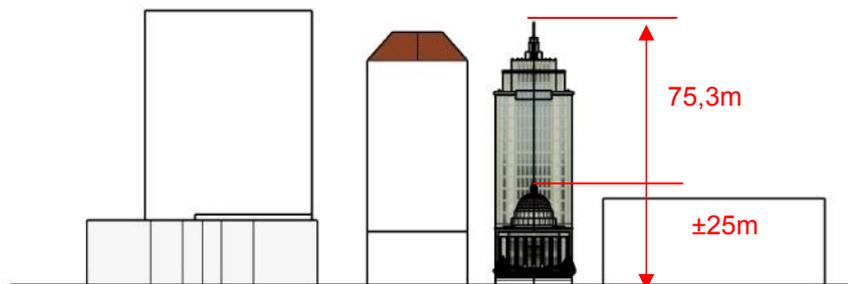
Gambar 11 : Orientasi fasad Mahkamah Konstitusi. Sumber: Google maps, 2022

Menurut Bentley & Brolin, konsep keterbacaan mengacu pada pemrosesan visual, yang dapat direduksi menjadi penggunaan elemen visual dalam bangunan. Secara umum, elemen visual tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain tinggi bangunan, material, dan tipologi (Dantrivani, 2021). Prinsip keserasian dan kontras telah digunakan dalam upaya mencapai penampilan gedung MK. Podium dan menara adalah dua bangunan yang membentuk bangunan ini. Untuk bangunan menara digunakan unsur harmoni dan kontras untuk membedakan bentuk bangunan, dan komponen dasar kontras ini bertujuan untuk membedakan dengan bentuk bangunan sekitarnya, seperti bangunan podium, atap bangunan (bentuk atap), dan fasad bangunan dari gedung-gedung di sekitarnya karena gedung MK ini memiliki fitur dan kegunaan yang berbeda untuk memudahkan mencari jalan.

Terhadap komponen tipologi bangunan, gedung MK pada bagian podium ini didesain dengan tipologi atap yang berbeda dari kawasan sekitar tapak. Pada bagian tower

gedung MK didesain dengan tipologi atap yang berbeda sama halnya pada desain bentuk atap pada bagian podium dari kawasan sekitar tapak. Desain bentuk atap pada bagian podium dan tower didesain dengan bentuk atap kubah mahkota yang merupakan desain arsitektur klasik dan pada bagian menara tower bernuansa modern.

Untuk komponen tinggi bangunan, bangunan di sekitar tapak mengalami transformasi geometri tambahan, dengan tinggi bangunan menara 16 sampai 20 lantai atau lebih, dan tinggi bangunan pedestal 3 sampai 5 lantai, yaitu gedung pencakar langit dengan tumpuan. itu saja. Atau minimal ketinggian bangunan tower maksimal sekitar ± 75 sampai 100 meter. Gedung MK dibangun untuk meratakan dan menstabilkan bangunan di sekitarnya.



Gambar 12 : Ketinggian atap. Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Mengenai komponen tipologi bangunan, gedung MK di atas podium didesain dengan tipologi fasad bangunan yang berbeda dengan area sekitar tapak. Kawasan di sekitar tapak pada dasarnya merupakan gedung perkantoran dan gedung pemerintahan, dan Gedung MK memiliki desain yang berbeda dengan desain fasad bangunan. Bagian podium memiliki sembilan pilar (pilar) yang menopang atap teras podium, dan 23 anak tangga harus dilalui untuk mencapai podium.

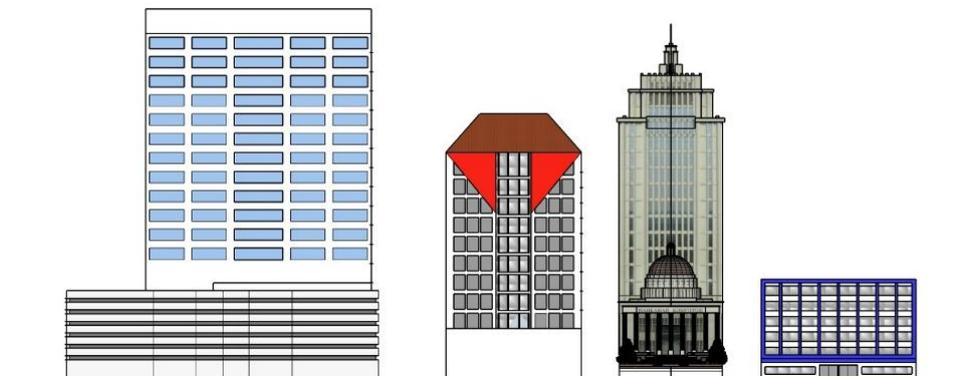


Gambar 13 : Penerapan sembilan pilar (kolom). Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Pilar – pilar yang berada di halaman podium ini memiliki gaya *gothic* namun berjumlah ganjil yang tidak lazim, tetapi pihak dari MK menjelaskan bahwa tidak ada

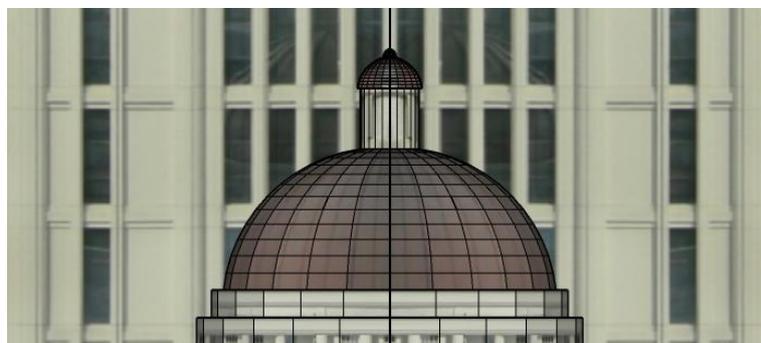
hukum yang melarang pilar berjumlah ganjil, karena hakim konstitusi berjumlah sembilan maka pilar dibuat berjumlah sembilan.

Bagian menara tower yang berjumlah 16 lantai dengan ketinggian 75,3 meter, mencoba menyelaraskan fasad bangunan pada bangunan sekitarnya walaupun dari peng gayaan kontras dengan bangunan sekitarnya. Pada bagian fasad bangunan ini didesain dengan garis vertikal dan horizontal pada bagian garis jendela kaca dengan pola grid sehingga fasad terlihat rapih. Garis vertikal dan horizontal bagian jendela ini mencoba untuk menyelaraskan dengan bangunan menara tower disekitarnya.



Gambar 14 : Konteks bangunan melalui fasad pada bangunan sekitar.
Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Dalam hal komponen bahan bangunan, bagian podium Mahkamah Konstitusi menerapkan asas kontras yaitu. H. bahan atap adalah bahan konstruksi podium. Atap kubah mahkota terbuat dari tembaga *Ticusink* bekas Jerman, yang diperkirakan akan berubah warna dari kuning menjadi hijau dalam 16 tahun kedepan. Prinsip kontras ini diterapkan berdasarkan tujuan bangunan, dengan lambang bentuk atap dan bahan yang digunakan melambangkan keagungan dan kewibawaan.



Gambar 15 : Material bangunan pada bagian atap podium.
Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

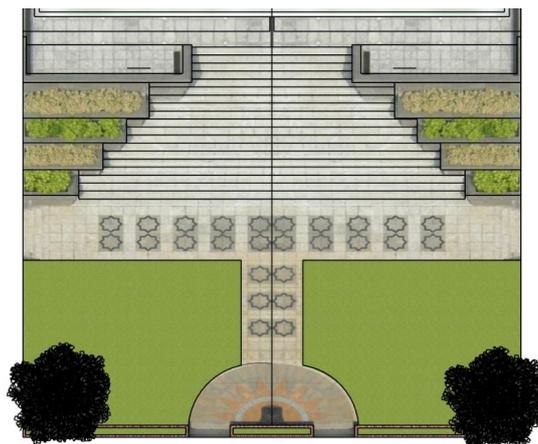
D. *Robustness*

Menurut Bentley, prinsip durabilitas berarti ruang yang bersifat sementara dan multifungsi. Dalam indikator ini, Bentley menekankan bahwa salah satu indikator bangunan yang menerapkan arsitektur kontekstual adalah ruang sementara atau *temporary* yang dapat digunakan untuk aktivitas yang tidak aman, memungkinkan ruang-ruang tersebut secara fleksibel mengakomodasi aktivitas yang berbeda (Dantrivani, 2021).

Pada gedung MK terdapat ruang yang menjadi ruang temporer untuk berbagai fungsi yaitu berada di area halaman depan podium. Pada area ini para pengunjung yang sudah memiliki perizinan untuk berkunjung, akan memasuki bangunan podium yang terdapat pedestrian di area halaman depan podium. Pada halaman depan para pengunjung harus naik anak tangga dan berpapasan dengan sembilan pilar, sehingga bisa merasakan kemegahan pada bangunan. Para pengunjung juga bisa mengambil gambar / foto di area tersebut, dan menikmati suasana dari atas di area halaman depan podium. Selain itu area depan halaman podium MK memiliki fungsi lain untuk para pegawai MK seperti pada upacara yang diadakan beberapa kali setiap tahunnya untuk memperingati Hari Nasional.

E. *Richness*

Prinsip kekayaan memiliki kekayaan rasa dan pengalaman melalui perbedaan material, penataan ruang, dll. Dengan indikator ini, Bentley menekankan upaya merancang pengalaman visual dan spasial dengan kedalaman dan interaksi (Journal Rakaditya, 2021). Dalam hal ini, bangunan gedung MK menerapkan asas keserasian yang maksimal, yang berlaku bagi bangunan yang mengelilingi persil yaitu penyajian vegetasi dan ruang hijau. Unsur vegetasi dan RTH telah diterapkan pada gedung MK dan gedung sekitarnya, sebagai pengalaman visual bagi pengunjung atau pengguna.



Gambar 16 : Ruang Terbuka Hijau di depan halaman podium.
Sumber: Dokumen Pribadi, 2022

Dalam penerapan *spatial experience*, gedung MK menawarkan ruang bagi pengunjung yaitu perpustakaan MK dan museum MK. Perpustakaan MK terletak di blok menara MK yang memiliki satu ruangan, namun seluruh ruangan dan lokasi

ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi buku, ruang baca dan ruang multimedia. Pengalaman spasial yang dimaksud di perpustakaan MK adalah pengunjung dapat merasakan hal-hal yang ditawarkan, setiap ruang saling berhubungan.



Gambar 17 : Perpustakaan dan Mini Bioskop Mahkamah Konstitusi RI

Museum MK berada di gedung yang sama dengan Perpustakaan hanya perbedaan letak lantai, di dalam ruang Museum MK terdapat benda – benda yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia dan pendirian MK, bioskop mini, games, patung – patung Presiden Indonesia, dan koleksi poster.

F. *Visual Appropriateness*

Desain gedung MK secara visual dapat menarik perhatian bagi pengunjung atau pengguna, gedung MK memiliki desain yang megah dengan menerapkan gaya neo klasik untuk membedakan visual dari bangunan sekitarnya, hal ini merupakan unsur kontras pada gedung MK.



Gambar 18 : Fasad gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI

Pada dasarnya bangunan di sekitar tapak adalah bangunan bertingkat yang memiliki podium, perencanaan desain bangunan gedung MK ini menyelaraskan dengan bangunan di sekitar tapak. Selain itu di kawasan gedung MK juga terdapat halaman depan podium berupa taman dan RTH untuk tetap menghadirkan penghijauan di kawasan tersebut. Ruang publik menjadi nilai penting pada bangunan dalam mengaitkan lingkungan perkantoran dengan lingkungan sekitarnya sehingga konsep kontekstual bisa dinikmati oleh pengguna maupun masyarakat sekitar (Dulantrinawawi, 2014).



Gambar 19 : Ruang Terbuka Hijau di gedung MK. Sumber Pribadi, 2022

G. *Personalization*

Personalization ditafsirkan sebagai figur atau representasi menurut Bentley. Arsitektur kontekstual ditekankan berdasarkan teori Bentley, harus mampu merepresentasikan area dan tempat di mana bangunan dibangun. Penerapan unsur personalization pada Gedung Mahkamah Konstitusi sudah mewadahi aktivitas bagi pengunjung maupun pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai representasi kegiatan, dengan adanya Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Museum Mahkamah Konstitusi, halaman depan Podium, dan Ruang Terbuka Hijau, sebagai representasi kebutuhan fungsi yang kolaboratif antara pengunjung (tamu), dan pegawai Mahkamah Konstitusi.

4. KESIMPULAN

Pada kesimpulan penelitian ini bangunan Gedung Mahkamah Konstitusi sudah mengupayakan dan menerapkan prinsip – prinsip Arsitektur Kontekstual. Gedung Mahkamah Konstitusi menyediakan akses bagi para pengunjung dan pengguna yang menaiki kendaraan pribadi, dan akses bagi para pejalan kaki. Gedung Mahkamah Konstitusi menerapkan batas – batas bagian tapak bangunan pada bagian fasad yang menghadap ke arah timur, yaitu memberi pagar dan elemen vegetasi berupa pohon.

Gedung MK menerapkan unsur harmoni dan kontras pada optik bangunan. Unsur keselarasan diterapkan pada komponen tipologi bangunan, mulai dari ketinggian bangunan pada bagian menara sedangkan elemen kontras diterapkan pada komponen tipologi bangunan pada bentuk fasad bangunan dan bentuk atap, serta bahan atap podium Mahkamah Konstitusi yang menggunakan tembaga Ticuzink buatan Jerman.

Penerapan Konsep Arsitektur Kontekstual melalui tujuh prinsip pada Gedung Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menerapkan unsur Harmoni dan Kontras pada bangunan sekitarnya. Pada dasarnya Gedung Mahkamah Konstitusi adalah bangunan yang memiliki bentuk desain yang berbeda dari bangunan sekitarnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurratul & Khatami, Said M. (2018), “*Arsitektur Kontekstual*”, *Rumoh*, Vol. 8 No. 15.
- Aqli, Wafirul, dkk. (2019), “*Permeabilitas Kawasan Jalan MH. Thamrin Terhadap Akses Pejalan Kaki Menuju Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta*”, *NALARs*, Vol. 18 No. 1, 75-84.
- Azkierfanawati, D & Lissimia, F. (2020), “*Kajian konsep biophilic pada bangunan hunian vertikal*”, *Arsitektur Zonasi*, Vol. 3 No. 2, 202–210.
- Bentley, Ian. (1985). “*Responsive Environments: A Manual for Designers*”, London: Architectural Press.
- CRP. (2007). “*Bangunan Berjuluk Rumah Konstitusi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bangunan-berjuluk-rumah-konstitusi-hol17366?page=all>, diakses pada 26 April 2022 pukul 05.42.
- Dantrivani & Rakadiya. (2021), “*Penerapan Arsitektur Kontekstual Pada Community Learning Center untuk Anak Putus Sekolah di Kapuk, Jakarta Barat*”, *Senthong Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektu*, Vol. 4 No. 1, 240 - 249.
- Dulantrinawawi, Krisentia G. (2014), “*Penerapan Konsep Kontekstual Paul Rudolph Pada Arsitektur Perkantoran Bertingkat Banyak di Indonesia*”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2.
- Eunike Trifena Kolibu, E. Al. (2017). “*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Di Tomohon “ Arsitektur Kontekstual .”*” 47–55.
- Fajar, Putra & Purwantiasning, Ari. (2021), “*Kajian Konsep Imageability dan Permeability dalam Pengembangan Kawasan Pusat Kota Baru Parahyangan*”, *Jurnal Arsitektur Zonasi*.
- Fitriana, Nadia Karisna. (2019). Unika Soegijapranata, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Google Maps. (2022). Gedung Mahkamah Konstitusi pada Google Maps. Tersedia pada: <https://www.google.co.id/maps/place/Mahkamah+Konstitusi+Republik+Indonesia/@6.1734955,106.8202261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e69f5d4f538e93f:0xcb55f6f4fcd19a3a!8m2!3d-6.1734956!4d106.8224019>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 05.53.

- Hantono, D., Setioko, B., & Indarto, E. (2021). Kualitas Visual Pada Ruang Terbuka Publik Kawasan Konservasi Arsitektur. CV. Pena Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/etgpw>
- Hantoro, E. Christianto. (2017). Unika Soegijapranata, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Indira, Aldira & Setyaningsih, Wiwik. (2018), “Penerapan Arsitektur Kontekstual Pada Revitalisasi Stasiun”, I(1), 37–44.
- Luthfillah, M H, & Soemardiono B . (2019), “Konsep Desain Stasiun Besar Kota Bogor dengan Pendekatan Kontekstual”, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 8 No. 2.
- Muharram, R, R., Pakpahan, R., & P, P. N. (2018), “Studi Pengaruh Signage Terhadap Estetika Visual Koridor Jalan Ahmad Yani Medan Ditinjau dari Aspek Harmoni dan Kontras”, *Jurnal Arsitektur ALUR*.
- Mahkamah Konstitusi RI. “Emblem, Hymne dan Mars”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=8&menu=2>, diakses pada tanggal 26 April pukul 06.02.
- Mahkamah Konstitusi RI. “Lokasi Mahkamah Konstitusi RF”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=8&menu=2>, diakses pada tanggal 26 April pukul 06.02.
- Pertiwi, D, M, Z, S., Purwantiasning, Ari. (2021), “Kajian Konsep Arsitektur Kontekstual Bentuk Pada Bangunan Perkantoran di Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan”, *Jurnal Arsitektur Zonasi*, Vol. 4 No. 3.
- Prayogo, Y. (2019). “Fakta Unik Gedung Mahkamah Konstitusi yang Kerap Jadi Spot Berswafoto”, <https://www.kalderanews.com/2019/06/fakta-unik-gedung-mahkamah-konstitusi-yang-kerap-jadi-spot-berswafoto/>, diakses pada 26 April 2022 pukul 05.46.
- PT. Vallis Fortuna. “Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RF”, https://www.vallisfortuna.com/featured_item/perpustakaan-mahkamah-konstitusi-ri/, diakses pada 26 April 2022 pukul 06.24.
- Putri, A., Faricha. (2016). “Landasan Teori Program Mixed Use Building di Kota Surakarta”. Semarang: Universitas Katolik Unika Soegijapranata.
- Rahayuningtyas, Novitasari, dkk. (2017), “Penerapan Arsitektur Kontekstual Dalam Perancangan Kawasan Wisata Budaya Samin di Blora”, *Region*, Vol. 15, No. 2, 378-388.